

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH	:	Birokrasi Pemerintahan
KODE MK	:	3KKBP408
SEMESTER	:	4

Tim Penyusun:

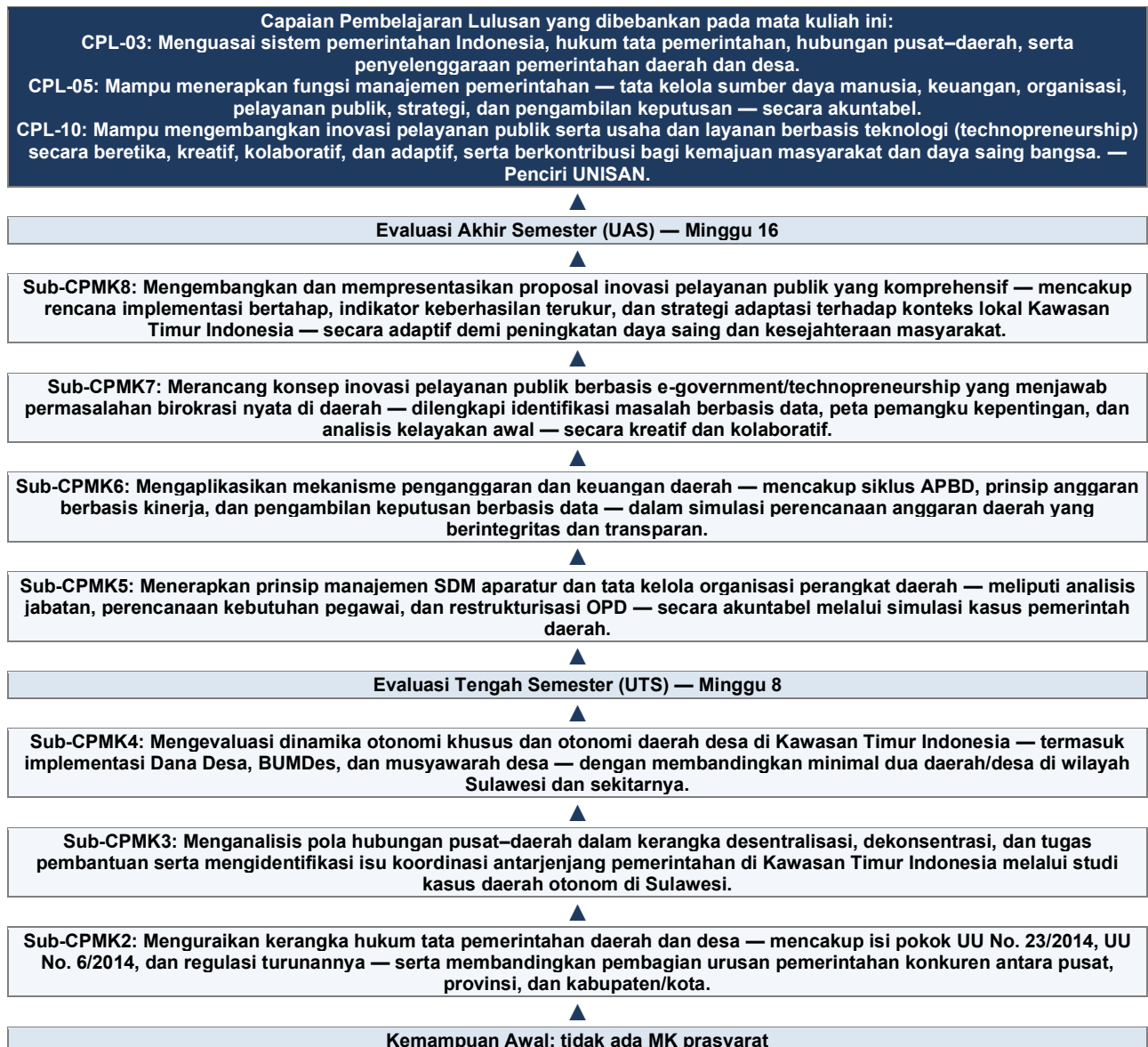
Purwanto, S.IP., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3KKBP408	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER							
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Birokrasi Pemerintahan		3KKBP408	MKWP	T=3	P=0	4	31 Mei 2023
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601	 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
	CPL-05	Mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — tata kelola sumber daya manusia, keuangan, organisasi, pelayanan publik, strategi, dan pengambilan keputusan — secara akuntabel.					
	CPL-10	Mampu mengembangkan inovasi pelayanan publik serta usaha dan layanan berbasis teknologi (technopreneurship) secara beretika, kreatif, kolaboratif, dan adaptif, serta berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan daya saing bangsa. — Penciri UNISAN.					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, struktur, dan landasan hukum birokrasi pemerintahan Indonesia — mencakup sistem pemerintahan, hierarki kelembagaan, serta kerangka hukum tata pemerintahan (UU Pemerintahan Daerah, UU Desa, dan regulasi turunannya) — sebagai fondasi analisis penyelenggaraan pemerintahan.					
	CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis pola hubungan pusat–daerah dan dinamika desentralisasi pemerintahan daerah serta desa di Kawasan Timur Indonesia — termasuk pembagian kewenangan, otonomi khusus, dan isu koordinasi antarjenjang pemerintahan — melalui studi kasus daerah otonom di wilayah Sulawesi dan sekitarnya.					
	CPMK3	Mahasiswa mampu menerapkan fungsi manajemen pemerintahan — meliputi tata kelola SDM aparatur, penganggaran dan keuangan daerah, organisasi perangkat daerah, serta pengambilan keputusan berbasis data — secara akuntabel dan berintegritas melalui simulasi kasus pengelolaan birokrasi pemerintah daerah.					

	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang proposal inovasi pelayanan publik berbasis teknologi (e-government/technopreneurship) yang responsif terhadap permasalahan birokrasi nyata di daerah — dilengkapi analisis kelayakan, peta pemangku kepentingan, dan rencana implementasi — secara kreatif, kolaboratif, dan adaptif demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal.			
		Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)			
	Sub-CPMK1	Menjelaskan konsep dasar birokrasi pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, dan hierarki kelembagaan negara beserta landasan hukumnya (UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014).			
	Sub-CPMK2	Menguraikan kerangka hukum tata pemerintahan daerah dan desa — mencakup isi pokok UU No. 23/2014, UU No. 6/2014, dan regulasi turunannya — serta membandingkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.			
	Sub-CPMK3	Menganalisis pola hubungan pusat–daerah dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta mengidentifikasi isu koordinasi antarjenjang pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus daerah otonom di Sulawesi.			
	Sub-CPMK4	Mengevaluasi dinamika otonomi khusus dan otonomi daerah desa di Kawasan Timur Indonesia — termasuk implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa — dengan membandingkan minimal dua daerah/desa di wilayah Sulawesi dan sekitarnya.			
	Sub-CPMK5	Menerapkan prinsip manajemen SDM aparatur dan tata kelola organisasi perangkat daerah — meliputi analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, dan restrukturisasi OPD — secara akuntabel melalui simulasi kasus pemerintah daerah.			
	Sub-CPMK6	Mengaplikasikan mekanisme penganggaran dan keuangan daerah — mencakup siklus APBD, prinsip anggaran berbasis kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data — dalam simulasi perencanaan anggaran daerah yang berintegritas dan transparan.			
	Sub-CPMK7	Merancang konsep inovasi pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship yang menjawab permasalahan birokrasi nyata di daerah — dilengkapi identifikasi masalah berbasis data, peta pemangku kepentingan, dan analisis kelayakan awal — secara kreatif dan kolaboratif.			
	Sub-CPMK8	Mengembangkan dan mempresentasikan proposal inovasi pelayanan publik yang komprehensif — mencakup rencana implementasi bertahap, indikator keberhasilan terukur, dan strategi adaptasi terhadap konteks lokal Kawasan Timur Indonesia — secara adaptif demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.			
		Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK			
					</

	<table><tr><td>Jumlah</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Jumlah	2	2	2	2																																																							
Jumlah	2	2	2	2																																																									
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																																												
	<table><tr><td></td><td>CPL-03 (%)</td><td>CPL-05 (%)</td><td>CPL-10 (%)</td><td>Bobot penilaian (%)</td><td>Jumlah Minggu</td></tr><tr><td>Sub-CPMK1</td><td>15</td><td></td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK2</td><td>7</td><td></td><td></td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Sub-CPMK3</td><td>15</td><td></td><td></td><td>15</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK4</td><td>14</td><td></td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK5</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK6</td><td></td><td>14</td><td></td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK7</td><td></td><td>7</td><td>7</td><td>14</td><td>2</td></tr><tr><td>Sub-CPMK8</td><td></td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>51</td><td>39</td><td>10</td><td>100</td><td>14</td></tr></table>		CPL-03 (%)	CPL-05 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	15			15	2	Sub-CPMK2	7			7	1	Sub-CPMK3	15			15	2	Sub-CPMK4	14			14	2	Sub-CPMK5		14		14	2	Sub-CPMK6		14		14	2	Sub-CPMK7		7	7	14	2	Sub-CPMK8		4	3	7	1		51	39	10	100	14
	CPL-03 (%)	CPL-05 (%)	CPL-10 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																																								
Sub-CPMK1	15			15	2																																																								
Sub-CPMK2	7			7	1																																																								
Sub-CPMK3	15			15	2																																																								
Sub-CPMK4	14			14	2																																																								
Sub-CPMK5		14		14	2																																																								
Sub-CPMK6		14		14	2																																																								
Sub-CPMK7		7	7	14	2																																																								
Sub-CPMK8		4	3	7	1																																																								
	51	39	10	100	14																																																								
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Birokrasi Pemerintahan (3 SKS) mengkaji konsep, struktur, dan landasan hukum birokrasi pemerintahan Indonesia secara komprehensif, mencakup sistem pemerintahan, hierarki kelembagaan, kerangka hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, desentralisasi, serta otonomi daerah dan desa sebagai fondasi analisis penyelenggaraan pemerintahan — dengan penekanan pada konteks Kawasan Timur Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Mata kuliah ini menempati posisi strategis dalam kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai jembatan antara penguasaan teori kelembagaan negara dan kemampuan terapan manajemen pemerintahan, sehingga menjadi prasyarat bagi mahasiswa sebelum menempuh mata kuliah yang berfokus pada kebijakan publik dan tata kelola lanjutan. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis kasus dan proyek (Case-Based Learning dan Project-Based Learning) sesuai SN-Dikti Pasal 14 dan KPT 2024, mahasiswa secara progresif bergerak dari analisis sistem birokrasi dan dinamika desentralisasi menuju simulasi pengelolaan birokrasi daerah yang akuntabel dan berintegritas, serta merancang proposal inovasi pelayanan publik berbasis teknologi yang responsif terhadap permasalahan nyata di daerah. Relevansi mata kuliah ini terhadap CPL-03, CPL-05, dan CPL-10 tercermin dalam integrasi nilai-nilai integritas, kreativitas, dan adaptabilitas sebagai penciri UNISAN-ICHSA-N, sekaligus menanamkan semangat technopreneurship yang berorientasi pada peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat lokal.																																																												
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dan teori birokrasi pemerintahan; 2. Landasan hukum tata pemerintahan Indonesia; 3. Struktur dan hierarki kelembagaan negara; 4. Sistem pemerintahan daerah dan desa; 5. Hubungan pusat–daerah dan desentralisasi; 6. Otonomi khusus di Kawasan Timur Indonesia;																																																												

	7. Manajemen SDM aparatur dan organisasi perangkat daerah; 8. Penganggaran dan keuangan daerah; 9. Pengambilan keputusan berbasis data birokrasi; 10. Pelayanan publik dan reformasi birokrasi; 11. Inovasi e-government dan technopreneurship daerah; 12. Perancangan proposal inovasi pelayanan publik.
Pustaka	Utama : (1) Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Edisi 1. Gramedia Pustaka Utama; (2) Osborne, D., dan Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Edisi 1. Addison-Wesley; (3) Riggs, F. W. (1964). Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Edisi 1. Houghton Mifflin; (4) Turnbull, N. (2017). Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge. Edisi 1. McGill-Queen's University Press; (5) Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edisi 2. University of California Press; (6) Zia, M. H., dan Omezzine, A. (2017). E-Government and Public Administration Reform. Edisi 1. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Pendukung : (1) Pramusinto, A. dan Purwanto, E. A. (Eds.). (2009). Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Gava Media; (2) Thoha, M. (2014). Birokrasi dan Politik di Indonesia. RajaGrafindo Persada; (3) Yusriadi. (2018). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik: Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Deepublish.
Dosen Pengampu	Purwanto, S.IP., M.Si.
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan konsep dasar birokrasi pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, dan hierarki kelembagaan negara beserta landasan	Mahasiswa mampu: Menjelaskan definisi birokrasi menurut Weber (rasionalitas, hierarki, spesialisasi,	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis lisan atau tertulis singkat	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka kuliah dengan pertanyaan pemantik tentang pengalaman mahasiswa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar (durasi 15-20 menit) yang menjelaskan kontrak	Bahan Kajian: Definisi dan unsur birokrasi Weberian: hierarki, spesialisasi, aturan tertulis,	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	hukumnya (UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014).	aturan tertulis) dengan kata-kata sendiri secara tepat - Menyebutkan minimal tiga ciri sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 - Mengidentifikasi hierarki kelembagaan negara dari tingkat pusat hingga desa sesuai kerangka konstitusional - Membedakan peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam tata pemerintahan Indonesia - Mengaitkan landasan hukum (UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014) dengan fungsi birokrasi pemerintahan secara ringkas	(10 menit) di akhir sesi: mahasiswa diminta menjelaskan satu konsep birokrasi Weberian dan menunjukkan posisinya dalam hierarki kelembagaan negara; kriteria: ketepatan definisi, kelengkapan unsur, dan keterkaitan dengan landasan hukum Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan menyampaikan pendapat dan bertanya dalam diskusi pengantar; menunjukkan sikap ingin tahu dan kesediaan mendengar perspektif	berinteraksi dengan birokrasi pemerintah di daerah masing-masing; memaparkan garis besar teori birokrasi Weber, konsep prismatic society Riggs, dan peta hierarki kelembagaan negara menggunakan LCD proyektor; mengakhiri sesi dengan kuis singkat tertulis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa berdiskusi berpasangan (think-pair-share) untuk membandingkan ciri birokrasi ideal Weber dengan realitas birokrasi yang mereka alami; hasil diskusi dipresentasikan singkat di depan kelas; mahasiswa menyempurnakan peta konsep berdasarkan masukan	perkuliahan, relevansi mata kuliah bagi mahasiswa di Kawasan Timur Indonesia, dan peta topik semester; mengunggah slide, tautan bacaan ringkas, dan instruksi peta konsep di LMS UNISAN (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dan membaca ringkasan bab pengantar dari pustaka utama, menonton video pengantar, lalu menyusun draf peta konsep secara mandiri dan mengunggahnya ke LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa mengamati satu contoh kasus disfungsi birokrasi daerah (disediakan dosen dalam bentuk artikel	impersonalitas; - Teori prismatic society Riggs dan relevansinya bagi birokrasi negara berkembang; - Sistem pemerintahan Indonesia: prinsip konstitusional dan pembagian kekuasaan; - Hierarki kelembagaan negara: pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan; - Landasan hukum tata pemerintahan: UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014; Pustaka: Weber (1978); Riggs (1964); Turnbull (2017).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			berbeda (nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N); dinilai dari frekuensi dan kualitas kontribusi Tugas: Peta konsep sederhana (satu halaman A4) yang memuat: definisi birokrasi, tiga teori utama (Weber, Riggs, New Public Management), hierarki kelembagaan negara, dan tiga landasan hukum pokok; dikumpulkan via LMS UNISAN sebelum pertemuan minggu ke-2	MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis kasus disfungsi birokrasi daerah yang disiapkan dosen; diskusi kelas dipandu dengan pertanyaan terstruktur untuk mengidentifikasi unsur-unsur teori birokrasi dalam konteks nyata Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun peta konsep yang menggambarkan keterkaitan antara definisi birokrasi (pendekatan Weber dan Riggs), hierarki kelembagaan negara Indonesia, serta tiga landasan hukum pokok (UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014); peta konsep dilengkapi catatan singkat (maksimal 150 kata) yang menjelaskan relevansi	ringkas) sebagai jangkar diskusi konsep Weber dan prismatic society Riggs Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				hierarki tersebut bagi tata pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia Deliverable: Satu file peta konsep (format Word atau PDF, satu halaman A4) beserta catatan singkat 150 kata, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-2			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis (15 menit, bobot 15%): mahasiswa menggambarkan bagan hierarki kelembagaan negara dan menjelaskan tiga perbedaan antara birokrasi ideal Weber dan realitas kelembagaan Indonesia; kriteria penilaian: akurasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu diskusi mendalam tentang perbedaan antara model Weberian dan realitas birokrasi Indonesia; setiap kelompok mempresentasikan bagan hierarki kelembagaan daerah pilihan (masing-masing 5-7 menit) diikuti tanya jawab kritis; dosen memberikan penguatan konsep dan umpan balik (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi lanjutan tentang struktur OPD dan contoh bagan kelembagaan daerah di Sulawesi (Provinsi Sulawesi Tengah atau Gorontalo sebagai konteks UNISAN) ke LMS UNISAN; menyediakan tautan portal resmi pemerintah daerah untuk eksplorasi mandiri (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: - Struktur hierarki kelembagaan negara Indonesia: lembaga tinggi negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa; - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kedudukannya dalam UU No. 23/2014; - Perbandingan birokrasi rasional-legal Weber dengan realitas	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			struktur hierarki (40%), ketepatan perbandingan teori-realitas (40%), kejelasan argumentasi (20%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi aktif dalam sesi presentasi bagan kelompok: kemampuan merespons pertanyaan kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan mengintegrasikan masukan (nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N); dinilai dari kualitas argumen dan sikap akademik Tugas:	Mahasiswa menggunakan papan tulis/whiteboard untuk memetakan bagan kelembagaan secara visual dan menunjukkan titik-titik koordinasi antarlembaga; kuis tertulis dilaksanakan di penghujung sesi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: setiap kelompok menganalisis satu kasus riil disfungsi atau keberhasilan koordinasi kelembagaan di pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia, mengaitkannya dengan teori Weber dan Riggs Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyempurnakan bagan hierarki kelembagaan negara yang mencakup:	Mahasiswa mengakses bagan kelembagaan resmi satu pemerintah provinsi di Kawasan Timur Indonesia melalui portal e-government yang tersedia, mengidentifikasi jenjang OPD-nya, dan membandingkannya dengan peta konsep yang telah disusun pada minggu ke-1 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok (3-4 orang) mulai menyusun draf bagan hierarki kelembagaan satu pemerintah daerah pilihan sebagai proyek mini yang akan dipresentasikan pada sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	kelembagaan Indonesia; • Implikasi teori prismatic society Riggs terhadap kelembagaan pemerintah di negara berkembang; • Landasan hukum pembentukan dan penataan kelembagaan negara; Pustaka: Weber (1978); Riggs (1964); Thoha (2014); Turnbull (2017).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bagan hierarki kelembagaan negara yang disempurnakan (format Word/PowerPoint, maksimal dua halaman A4) berdasarkan umpan balik sesi kelas, dilengkapi keterangan singkat fungsi tiap jenjang dan dasar hukumnya; dikumpulkan via LMS UNISAN	struktur kelembagaan pusat (lembaga tinggi negara), provinsi, kabupaten/kota, dan desa; kolom keterangan fungsi pokok dan dasar hukum tiap jenjang; serta analisis singkat (200-250 kata) yang mengaitkan struktur tersebut dengan teori birokrasi Weber dan menyoroti satu isu kelembagaan aktual di Kawasan Timur Indonesia Deliverable: Satu file bagan kelembagaan (Word atau PowerPoint, maksimal dua halaman A4) beserta analisis singkat 200-250 kata, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-3			
3	Sub-CPMK2: Menguraikan kerangka hukum tata pemerintahan daerah dan desa — mencakup isi pokok UU No. 23/2014, UU No. 6/2014, dan	Mahasiswa mampu: • Menguraikan isi pokok UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah secara	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis tertulis singkat (10 menit,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka hukum pemerintahan daerah dan desa secara terstruktur	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah ringkasan tabel pembagian urusan konkuren berdasarkan	Bahan Kajian: • Isi pokok UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah: asas penyelenggaraan,	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	regulasi turunannya — serta membandingkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.	sistematis mencakup asas, pembagian urusan, dan mekanisme pengawasan • Menguraikan isi pokok UU No. 6/2014 tentang Desa mencakup kewenangan desa, sumber pendanaan, dan perencanaan pembangunan desa • Membandingkan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan lampiran UU No. 23/2014 untuk minimal dua sektor (misalnya pendidikan dan kesehatan) • Mengidentifikasi minimal dua regulasi turunan (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang memperinci pelaksanaan UU No.	bobot bagian dari 7%): mahasiswa mengisi matriks pembagian urusan konkuren untuk dua sektor yang ditentukan dosen; kriteria: ketepatan penempatan kewenangan per jenjang (50%), kelengkapan regulasi pendukung yang disebutkan (30%), kerapian penyajian (20%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam simulasi rapat koordinasi: kemampuan berargumentasi berdasarkan regulasi, mendengarkan pihak lain, dan mencapai kesepakatan (nilai	menggunakan LCD proyektor; memandu simulasi mini 'rapat koordinasi pembagian urusan' di mana setiap kelompok mewakili satu jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa) dan bernegosiasi penetapan kewenangan sektor tertentu (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menggunakan papan tulis untuk memetakan secara visual hasil negosiasi pembagian urusan; mendiskusikan temuan draf matriks individu dalam kelompok dan menyusun matriks kelompok yang lebih lengkap; kuis singkat dilaksanakan di akhir sesi MP — Metode Pembelajaran:	lampiran UU No. 23/2014, tautan teks resmi UU No. 23/2014 dan UU No. 6/2014 dari JDIH, serta video pengantar singkat (10-12 menit) yang menyoroti pasal-pasal kunci dan regulasi turunannya (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca bagian yang ditentukan dari UU No. 23/2014 (Bab IV tentang Urusan Pemerintahan) dan UU No. 6/2014 (Bab IV tentang Kewenangan Desa), kemudian mengisi draf matriks pembagian urusan secara mandiri sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis satu contoh kasus sengketa kewenangan	jenis urusan pemerintahan, dan mekanisme pengawasan; • Isi pokok UU No. 6/2014 tentang Desa: kewenangan desa, dana desa, dan perencanaan pembangunan desa; • Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; • Regulasi turunan: Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait pelaksanaan otonomi daerah; • Potensi tumpang tindih kewenangan dan mekanisme penyelesaiannya; Pustaka: Pramusinto dan Purwanto (2009); Thoah (2014); Dwiyanto (2011).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		23/2014 atau UU No. 6/2014 • Menyusun matriks pembagian urusan konkuren yang menggambarkan perbedaan kewenangan antara ketiga jenjang pemerintahan secara akurat	Harmony dan Service ICHSA-N); dinilai dari kualitas argumen berbasis hukum dan etika berdiskusi Tugas: Matriks pembagian urusan konkuren (tabel Word, minimal tiga sektor, mencakup pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dilengkapi kolom regulasi dasar dan catatan analisis singkat (150-200 kata) tentang potensi tumpang tindih kewenangan; dikumpulkan via LMS UNISAN	Case-Based Learning: analisis kasus sengketa kewenangan daerah diintegrasikan dalam simulasi rapat koordinasi untuk mengoperasionalkan pemahaman normatif tentang pembagian urusan konkuren Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren yang mencakup minimal tiga sektor (misalnya pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) dengan kolom: jenjang pemerintahan (pusat/provinsi/kabupaten-kota/desa), kewenangan spesifik, dan regulasi dasar; dilengkapi catatan analisis singkat (150-200 kata) yang mengidentifikasi potensi tumpang tindih	antara provinsi dan kabupaten/kota (kasus disediakan dosen) sebagai bahan diskusi untuk memahami urgensi kejelasan pembagian urusan konkuren Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kewenangan dan mengaitkannya dengan satu kasus nyata di Kawasan Timur Indonesia Deliverable: Satu file matriks (tabel Word, minimal tiga sektor, empat kolom) beserta catatan analisis 150-200 kata, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-4			
4,5	Sub-CPMK3: Menganalisis pola hubungan pusat–daerah dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta mengidentifikasi isu koordinasi antarjenjang pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus daerah otonom di Sulawesi.	Mahasiswa mampu: • Menganalisis perbedaan konseptual antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan beserta implikasi masing-masing bagi kewenangan dan akuntabilitas daerah • Mengidentifikasi minimal tiga isu koordinasi antarjenjang pemerintahan yang terjadi di daerah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada kuis tertulis pada minggu ini; penilaian berbasis presentasi analisis kasus kelompok: kriteria mencakup ketajaman analisis menggunakan konsep desentralisasi/dekonsentrasi/tugas pembantuan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan penjelasan konseptual komprehensif tentang tipologi desentralisasi menggunakan pemetaan visual di papan tulis; setiap kelompok mempresentasikan laporan analisis kasus (6-8 menit per kelompok) diikuti diskusi panel; dosen memberikan sintesis dan penguatan konsep di akhir	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah modul ringkas tentang tiga konsep (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan), bahan studi kasus berupa artikel atau laporan evaluasi otonomi daerah di Sulawesi (misalnya laporan DPRD atau Kemendagri yang tersedia publik), dan panduan penyusunan laporan analisis kasus	Bahan Kajian: • Konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan: definisi, mekanisme, dan implikasi akuntabilitas; • Pola hubungan pusat-daerah dalam kerangka otonomi daerah Indonesia; • Isu koordinasi antarjenjang pemerintahan di Kawasan Timur	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		otonom di Sulawesi berdasarkan data atau laporan yang tersedia • Menganalisis pola hubungan pusat-daerah dalam kasus konkret di Kawasan Timur Indonesia menggunakan kerangka desentralisasi yang telah dipelajari • Mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi yang ada (misalnya Musrenbang dan rapat koordinasi gubernur) dalam mengatasi isu hubungan pusat-daerah • Menyusun argumen berbasis data tentang kelebihan dan keterbatasan model desentralisasi asimetris untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah di Kawasan Timur Indonesia	(40%), penggunaan data atau fakta lapangan daerah Sulawesi (35%), dan kualitas argumen tertulis dalam laporan (25%) Partisipasi kelas & laboratorium: Kontribusi dalam diskusi panel kelas: kemampuan mengajukan pertanyaan kritis berbasis data, merespons argumen kelompok lain secara konstruktif, dan menunjukkan kepedulian terhadap isu tata kelola daerah (nilai Nationalism dan Service ICHSA-N); dinilai dari	sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menggunakan whiteboard untuk memetakan secara visual hubungan antara jenjang pemerintahan dan mekanisme koordinasi dalam kasus yang dianalisis; antarkelompok saling memberikan umpan balik terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: presentasi dan diskusi analisis kasus daerah otonom di Sulawesi dengan pendekatan komparatif antara kelompok untuk mengidentifikasi pola umum dan kekhasan tiap daerah dalam konteks Kawasan Timur Indonesia	(via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok (3-4 orang) membagi tugas membaca sumber: satu anggota fokus pada konsep desentralisasi dari pustaka akademik, anggota lain menelusuri data lapangan daerah otonom di Sulawesi melalui portal resmi pemerintah daerah; kelompok menyusun draf laporan analisis sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: setiap kelompok mengerjakan kasus spesifik satu daerah otonom di Sulawesi (misalnya Kabupaten Banggai, Morowali, atau Bone Bolango) untuk	Indonesia; • Studi kasus daerah otonom di Sulawesi: kapasitas fiskal, kelembagaan, dan mekanisme koordinasi; • Desentralisasi asimetris dan relevansinya bagi daerah dengan kapasitas terbatas; Pustaka: Pramusinto dan Purwanto (2009); Dwiyanto (2011); Thoha (2014); Riggs (1964).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			relevansi dan kedalaman pertanyaan atau tanggapan Tugas: Laporan analisis kasus kelompok (3-4 halaman A4, format Word) yang mengkaji pola hubungan pusat-daerah satu daerah otonom di Sulawesi: mencakup identifikasi isu koordinasi, analisis menggunakan kerangka desentralisasi, dan rekomendasi perbaikan mekanisme koordinasi; dikumpulkan via LMS UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun laporan analisis kasus hubungan pusat-daerah untuk satu daerah otonom di Sulawesi yang mencakup: (1) deskripsi singkat profil daerah dan kapasitas fiskalnya; (2) pemetaan pola hubungan pusat-daerah menggunakan kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; (3) identifikasi dan analisis minimal tiga isu koordinasi antarjenjang yang aktual; (4) evaluasi kritis mekanisme koordinasi yang berjalan; serta (5) dua rekomendasi perbaikan yang realistis dan kontekstual Deliverable: Laporan analisis kasus (3-4 halaman A4, font Times	dianalisis pola hubungan pusat-daerahnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				New Roman 12, spasi 1,5, format Word) beserta slide presentasi PowerPoint (maksimal 8 slide), keduanya diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu ke-5			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis analisis singkat: diberikan skenario pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah di Sulawesi; mahasiswa mengklasifikasikan jenis pelimpahan wewenang, mengidentifikasi potensi konflik koordinasi, dan memberikan argumentasi berbasis konsep	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi panel berbasis studi kasus yang telah disiapkan mahasiswa secara daring; dosen memetakan pola hubungan pusat–daerah di whiteboard secara visual (diagram hierarki dan alur koordinasi), memberikan pendalaman konseptual, dan memandu sesi tanya jawab kritis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan temuan studi kasus daerah pilihan masing-masing secara	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah pendek (15–20 menit) yang menjelaskan tipologi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan disertai contoh regulasi aktual Indonesia, kemudian membuka sesi diskusi asinkronus di forum LMS UNISAN dengan pertanyaan pemantik tentang kasus koordinasi di Sulawesi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video kuliah, membaca	Bahan Kajian: • Tipologi desentralisasi: desentralisasi politik, administratif (dekonsentrasi), dan fiskal; • Tugas pembantuan dan batas kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; • Pola hubungan hierarkis dan koordinatif dalam sistem pemerintahan Indonesia; • Isu koordinasi antarjenjang: tumpang tindih kewenangan, kesenjangan fiskal, dan kapasitas birokrasi	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			desentralisasi. Kriteria: ketepatan klasifikasi wewenang (40%), kedalaman analisis isu koordinasi (40%), kualitas argumentasi dengan rujukan konsep (20%) Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif dalam diskusi studi kasus: mengajukan pertanyaan atau tanggapan substantif berbasis data/regulasi, menghormati perspektif rekan dari daerah yang berbeda, dan menampilkan sikap kritis yang bertanggung	bergantian dalam kelompok kecil, mendiskusikan persamaan dan perbedaan pola koordinasi antarjenjang, dan bersama-sama merumuskan simpulan tentang faktor penentu efektivitas desentralisasi di Kawasan Timur Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan simulasi rapat koordinasi: kelompok mahasiswa menjalankan peran sebagai perwakilan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam skenario koordinasi kebijakan di Sulawesi, lalu menegosiasikan pembagian kewenangan dan anggaran secara terstruktur di ruang kelas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60' Tugas:	bahan yang diunggah di LMS, mengakses portal resmi pemerintah daerah Sulawesi untuk menelusuri data pembagian urusan, lalu memposting respons analitis (minimal 150 kata) di forum diskusi LMS sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menganalisis kasus nyata daerah otonom di Sulawesi (misalnya konflik kewenangan pengelolaan tambang atau layanan kesehatan antara provinsi dan kabupaten) melalui sumber daring, kemudian mendokumentasikan temuan awal sebagai bahan diskusi luring	daerah di Sulawesi; • Mekanisme koordinasi formal dan informal dalam konteks Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Riggs, F. W. (1964); Turnbull, N. (2017); Pramusinto, A. dan Purwanto, E. A. (Eds.). (2009); Thoha, M. (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			jawab (Integrity dan Harmony dalam bernalar publik) Tugas: Laporan analisis studi kasus hubungan pusat–daerah di satu daerah otonom di Sulawesi (pilihan mahasiswa): mengidentifikasi jenis pelimpahan wewenang yang berlaku, memetakan isu koordinasi antarjenjang, dan merumuskan minimal dua rekomendasi perbaikan; maksimal 800 kata, dilengkapi bagan alur kewenangan, dikumpulkan via LMS UNISAN	Mahasiswa secara individual menyusun laporan analisis hubungan pusat–daerah pada satu daerah otonom di Sulawesi. Laporan harus mencakup: (1) identifikasi jenis pelimpahan wewenang yang berlaku (desentralisasi, dekonsentrasi, dan/atau tugas pembantuan) beserta dasar regulasinya; (2) pemetaan isu koordinasi antarjenjang yang teridentifikasi dari data atau berita daerah; (3) bagan alur kewenangan yang digambar secara manual atau digital; dan (4) minimal dua rekomendasi perbaikan koordinasi yang spesifik dan dapat diterapkan. Tugas mencerminkan nilai Service (berorientasi pada pembenahan pelayanan publik di daerah) dan Nationalism (kesadaran terhadap kesenjangan pembangunan KTI).	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Laporan tertulis maksimal 800 kata (di luar bagan) dalam format Microsoft Word, disertai satu bagan alur kewenangan, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan minggu berikutnya			
6,7	Sub-CPMK4: Mengevaluasi dinamika otonomi khusus dan otonomi daerah desa di Kawasan Timur Indonesia — termasuk implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa — dengan membandingkan minimal dua daerah/desa di wilayah Sulawesi dan sekitarnya.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan kerangka hukum otonomi desa berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa dan kebijakan turunannya yang berlaku di Kawasan Timur Indonesia • Mengidentifikasi mekanisme pengelolaan Dana Desa, alur pencairan, prioritas penggunaan, dan pertanggungjawaban di desa-desa Sulawesi	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini (bobot —%); penilaian dilakukan melalui tugas dan partisipasi Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif berkontribusi dalam diskusi kelompok studi kasus dua desa: menyampaikan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka kuliah dengan pemaparan singkat kerangka konseptual otonomi desa dan posisi Dana Desa dalam sistem pemerintahan daerah, kemudian memfasilitasi sesi presentasi kelompok dan diskusi kelas berbasis matriks perbandingan yang telah disusun mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan perbandingan dua desa di Sulawesi (Dana Desa,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan tentang regulasi otonomi desa dan kebijakan Dana Desa di LMS UNISAN, disertai tautan video dokumenter atau laporan audit BPK/BPKP tentang Dana Desa di Sulawesi sebagai bahan eksplorasi mandiri (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa membaca regulasi dan bahan yang diunggah, menelusuri data Dana Desa dari	Bahan Kajian: • Kerangka hukum otonomi desa: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya; • Mekanisme Dana Desa: alur pencairan, prioritas penggunaan, dan sistem pertanggungjawaban; • BUMDes sebagai instrumen ekonomi desa: konsep, regulasi, dan praktik di Sulawesi; • Musyawarah desa sebagai forum partisipasi demokratis dalam tata	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Membandingkan implementasi BUMDes dan musyawarah desa pada minimal dua desa/daerah di wilayah Sulawesi berdasarkan data sekunder yang dapat diverifikasi - Mengidentifikasi hambatan kapasitas birokrasi desa (SDM, sistem informasi, pengawasan) yang memengaruhi efektivitas pengelolaan otonomi desa di Kawasan Timur Indonesia - Merumuskan perbedaan kontekstual antara otonomi desa di wilayah Sulawesi dengan daerah lain di Indonesia sebagai dasar evaluasi kebijakan	data/informasi faktual, merespons temuan rekan secara kritis dan konstruktif, serta menampilkan sikap menghargai keberagaman kondisi desa di KTI (Harmony dan Service sebagai aparatur yang peduli pemberdayaan masyarakat desa) Tugas: Matriks perbandingan implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa pada dua desa/daerah di Sulawesi: mencakup kolom aspek (regulasi, anggaran, partisipasi	BUMDes, musyawarah desa) menggunakan slide PowerPoint, diikuti tanya jawab antar kelompok; dosen memberikan pendalaman dan koreksi konseptual, serta mendorong mahasiswa menghubungkan temuan dengan teori prismatic society Riggs tentang kapasitas birokrasi di negara berkembang MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan presentasi komparatif: kelompok menyajikan dua kasus desa secara berdampingan, kelas mendiskusikan faktor yang membedakan keberhasilan dan hambatan otonomi desa, dan dosen memandu sintesis untuk mempersiapkan evaluasi mendalam di minggu 7	portal resmi Kementerian Desa PDTT dan sumber daerah Sulawesi, kemudian mengisi lembar kerja pra-kelas (template matriks perbandingan) yang sudah disiapkan dosen di LMS MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis data sekunder: mahasiswa secara berpasangan atau kelompok kecil mengumpulkan data implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa dari dua desa pilihan di Sulawesi menggunakan sumber yang dapat diverifikasi (laporan desa, portal pemerintah, artikel ilmiah), sebagai bahan analisis luring	kelola desa; Kapasitas birokrasi desa di Kawasan Timur Indonesia: SDM, pengawasan, dan sistem informasi desa; Pustaka: Riggs, F. W. (1964); Pramusinto, A. dan Purwanto, E. A. (Eds.). (2009); Yusriadi. (2018); Thoha, M. (2014).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			masyarakat, hambatan, capaian), dilengkapi narasi analitis 400–500 kata yang mengevaluasi perbedaan dan persamaan kedua desa; dikumpulkan via LMS UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara berkelompok (2–3 orang), mahasiswa menyusun matriks perbandingan implementasi tiga aspek otonomi desa — Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa — pada dua desa atau daerah yang berbeda di wilayah Sulawesi. Matriks mencakup kolom: dasar regulasi yang diterapkan, besaran dan alokasi anggaran, tingkat partisipasi masyarakat, hambatan utama yang ditemukan, dan capaian yang terukur. Matriks dilengkapi narasi analitis 400–500 kata yang mengevaluasi persamaan, perbedaan, dan implikasi kebijakan dari kedua kasus. Tugas ini membangun fondasi untuk evaluasi mendalam pada minggu 7 dan	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				mencerminkan nilai Adaptability (memahami keragaman konteks desa di KTI) serta Nationalism (komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat desa di wilayah yang tertinggal). Deliverable: Matriks perbandingan dalam format tabel Microsoft Word (minimal 5 aspek x 2 desa) disertai narasi analitis 400–500 kata, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat H-2 sebelum pertemuan minggu 7 sebagai bahan presentasi			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis evaluatif akhir subtopik otonomi (Sub-CPMK4, bobot 14%): mahasiswa diberikan data ringkas	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi debat kebijakan terstruktur: tiap kelompok/individu mempresentasikan rekomendasi kebijakan otonomi desa atau otonomi khusus, kelompok lain berperan sebagai tim	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan rekomendasi kebijakan berbasis bukti di LMS UNISAN, menyediakan rubrik evaluasi untuk kuis akhir subtopik, dan membuka forum diskusi daring bagi mahasiswa	Bahan Kajian: • Evaluasi komparatif implementasi Dana Desa dan BUMDes pada dua desa di Sulawesi: capaian, hambatan, dan kesenjangan kebijakan; • Dinamika otonomi khusus di Kawasan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			implementasi Dana Desa atau BUMDes di satu desa Sulawesi, kemudian diminta mengevaluasi efektivitasnya menggunakan minimal dua perspektif teori yang telah dipelajari dan merumuskan satu rekomendasi kebijakan. Kriteria: ketajaman evaluasi berbasis data (35%), penggunaan teori yang tepat dan relevan (35%), kualitas dan kelayakan rekomendasi kebijakan (30%) Partisipasi kelas & laboratorium: Aktif dalam sesi presentasi dan	penguji yang mengajukan sanggahan berbasis data dan teori; dosen memandu sintesis dan mengklarifikasi kesalahan konsep (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyajikan rekomendasi kebijakan secara lisan (5–7 menit per kelompok), merespons pertanyaan dari penguji, dan bersama dosen merumuskan pelajaran kunci tentang faktor penentu keberhasilan otonomi desa di Kawasan Timur Indonesia; sesi diakhiri dengan kuis evaluatif tertulis Sub-CPMK4 MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan debat kebijakan: mahasiswa memposisikan diri sebagai analis dan	yang ingin memverifikasi argumen atau data sebelum pertemuan luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengembangkan temuan matriks perbandingan minggu 6 menjadi draf rekomendasi kebijakan secara mandiri, mengonsultasikan draf via forum LMS jika diperlukan, dan menyiapkan bahan presentasi dalam format PowerPoint untuk sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengolah data komparatif yang telah dikumpulkan pada minggu 6 menjadi dokumen kebijakan ringkas dengan argumen	Timur Indonesia: kerangka regulasi, alokasi anggaran, dan kapasitas kelembagaan; • Kesenjangan antara desain kebijakan otonomi desa dan realitas birokrasi desa di lapangan; • Rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan otonomi desa dan pelayanan publik di KTI; • Sintesis teori birokrasi Weberian dan prismatic society dalam konteks evaluasi otonomi daerah; Pustaka: Weber, M. (1978); Riggs, F. W. (1964); Dwiyanto, A. (2011); Pramusinto, A. dan Purwanto, E. A. (Eds.). (2009); Yusriadi. (2018).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			debat kebijakan: menyampaikan argumen evaluatif yang didukung data, merespons kritik rekan secara konstruktif, dan menampilkan kepemimpinan kolaboratif dalam kelompok (Integrity dalam penilaian kebijakan dan Service dalam orientasi perbaikan pelayanan desa) Tugas: Dokumen rekomendasi kebijakan individual: evaluasi dinamika otonomi desa atau otonomi khusus pada satu daerah/desa di Sulawesi, dilengkapi	pembuat kebijakan, mengintegrasikan analisis komparatif dua minggu (minggu 6–7) menjadi argumen evaluatif yang koheren, dan mempertahankan rekomendasi di hadapan kelas sebagai simulasi forum koordinasi pemerintahan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Secara individual, mahasiswa menyusun dokumen rekomendasi kebijakan yang merupakan kelanjutan dan pendalaman dari matriks perbandingan kelompok pada minggu 6. Dokumen mencakup: (1) evaluasi kritis atas dinamika otonomi desa atau otonomi khusus pada satu daerah/desa di Sulawesi, mengidentifikasi kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi; (2) analisis	evaluatif, mensimulasikan peran sebagai analis kebijakan yang memberikan masukan kepada pemerintah daerah di Sulawesi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			minimal tiga rekomendasi kebijakan yang spesifik dan dapat diimplementasikan; panjang 600–800 kata, format Microsoft Word, dikumpulkan via LMS UNISAN	faktor penyebab kesenjangan menggunakan perspektif teori (Weberian, prismatic society, atau reformasi birokrasi); dan (3) minimal tiga rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, dan kontekstual dengan KTI, disertai justifikasi mengapa rekomendasi tersebut layak diterapkan. Tugas mencerminkan nilai Creativity (merancang solusi inovatif berbasis konteks lokal), Nationalism (kepedulian terhadap pembangunan daerah tertinggal), dan Adaptability (merespons keragaman kondisi desa di KTI). Deliverable: Dokumen rekomendasi kebijakan 600–800 kata dalam format Microsoft Word, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat sebelum kuis dilaksanakan pada pertemuan minggu 7; dokumen juga digunakan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				sebagai bahan presentasi dalam sesi debat kebijakan luring			
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester : Cakupan: Sub-CPMK1–Sub-CPMK4						
9,10	Sub-CPMK5: Menerapkan prinsip manajemen SDM aparatur dan tata kelola organisasi perangkat daerah — meliputi analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, dan restrukturisasi OPD — secara akuntabel melalui simulasi kasus pemerintah daerah.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi komponen analisis jabatan (tugas pokok, fungsi, dan syarat jabatan) pada struktur OPD kabupaten/kota di Kawasan Timur Indonesia • Menjelaskan tahapan perencanaan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja sesuai regulasi manajemen ASN • Membedakan tipologi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kewenangan, nomenklatur, dan pola hubungan hierarkis • Menganalisis keterkaitan antara struktur OPD dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; penilaian formatif melalui kuis singkat di LMS UNISAN yang menguji pemahaman konsep analisis jabatan dan nomenklatur OPD (5 butir soal pilihan ganda + 2 butir uraian singkat; kriteria: ketepatan konsep, kejelasan argumentasi) Partisipasi kelas & laboratorium:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan klarifikasi konsep kunci (10 menit), memfasilitasi presentasi bagan OPD tiap kelompok (masing-masing 8 menit), dan memimpin diskusi pleno untuk mengevaluasi kesesuaian analisis jabatan dengan prinsip akuntabilitas; menggunakan papan tulis untuk memvisualisasikan hierarki OPD secara langsung (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan bagan OPD hasil kerja awal, merespons pertanyaan teman dan dosen, lalu merevisi bagan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video micro-lecture (15-20 menit) tentang konsep analisis jabatan, nomenklatur OPD, dan regulasi manajemen ASN ke LMS UNISAN; menyediakan lembar kerja digital dan skenario kasus OPD Kabupaten fiktif di Kawasan Timur Indonesia; membuka forum diskusi asinkron untuk tanya-jawab konsep (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyimak video micro-lecture, membaca regulasi dan bahan bacaan yang diunggah di LMS, mengerjakan kuis	Bahan Kajian: • Konsep analisis jabatan: tugas pokok, fungsi, dan syarat jabatan dalam OPD; • Perencanaan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja dan regulasi ASN; • Tipologi dan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah; • Hubungan struktur OPD dengan efektivitas pelayanan publik daerah; • Hambatan akuntabilitas tata kelola SDM aparatur di pemerintah daerah Kawasan Timur Indonesia; Pustaka:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		efektivitas pelayanan publik daerah dengan menggunakan kerangka birokrasi Weberian • Mengidentifikasi hambatan akuntabilitas dalam tata kelola SDM aparatur pada pemerintah daerah melalui studi kasus	Keaktifan dalam diskusi kelompok kecil (3-4 mahasiswa) saat memetakan bagan OPD kabupaten/kota: dinilai berdasarkan frekuensi kontribusi gagasan, kemampuan menerima dan memberi masukan secara konstruktif, serta sikap menghargai perbedaan pendapat (nilai integritas dan harmoni ICHSA-N) Tugas: Bagan analisis jabatan satu OPD fiktif berbasis skenario kabupaten di Sulawesi/Papua:	berdasarkan masukan diskusi pleno sebelum pengumpulan akhir via LMS MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi pleno berbasis skenario kasus OPD kabupaten di Kawasan Timur Indonesia; kelompok memperdebatkan pilihan restrukturisasi OPD yang paling akuntabel dan efisien, mengaitkannya dengan teori birokrasi Weberian dan prinsip impersonalitas Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa (individual atau berpasangan) membuat bagan analisis jabatan untuk satu OPD dalam skenario Kabupaten fiktif di Sulawesi/Papua	formatif, dan mulai memetakan bagan OPD sesuai skenario kasus secara mandiri atau berpasangan sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis skenario tertulis sebuah kabupaten fiktif di Sulawesi yang menghadapi tumpang tindih kewenangan OPD dan kekurangan pegawai teknis, kemudian menjawab pertanyaan pemandu yang disiapkan dosen di LMS Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Weber (1978); Riggs (1964); Thoha (2014); Pramusinto dan Purwanto (2009).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memuat uraian tugas, fungsi, syarat jabatan, dan estimasi beban kerja; format Word/PowerPoint , maksimal 4 halaman atau 6 slide	yang diberikan dosen. Bagan mencakup: (1) uraian tugas pokok dan fungsi tiap jabatan struktural; (2) syarat jabatan (pendidikan, kompetensi, pengalaman); (3) estimasi kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja; dan (4) catatan singkat tentang potensi hambatan akuntabilitas dalam pengisian jabatan tersebut. Tugas mengintegrasikan nilai integritas (Integrity ICHSA-N) dengan mencantumkan klausul pencegahan konflik kepentingan dalam penempatan jabatan. Deliverable: Satu dokumen Word atau PowerPoint berisi bagan analisis jabatan OPD lengkap (maksimal 4 halaman atau 6 slide), diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi luring minggu berikutnya			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian sumatif berbasis tugas kelompok dan presentasi (bobot 14%): kriteria meliputi (a) kelengkapan komponen analisis jabatan dan peta kebutuhan pegawai, (b) logika argumentasi restrukturisasi, (c) kesesuaian dengan regulasi OPD yang berlaku, dan (d) kemampuan menjawab pertanyaan penguji dalam simulasi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi simulasi sidang kelembagaan: tiap kelompok mempresentasikan proposal restrukturisasi (10 menit presentasi + 10 menit tanya-jawab); dosen dan mahasiswa lain berperan sebagai 'anggota tim anggaran dan kepegawaian' yang mengajukan pertanyaan; dosen memberikan umpan balik terstruktur di akhir tiap sesi dan merangkum pelajaran lintas kelompok (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyajikan proposal, merespons pertanyaan, mencatat umpan balik, dan melakukan revisi akhir dokumen untuk dikumpulkan ke LMS setelah sesi; mahasiswa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah rubrik penilaian presentasi dan panduan penyusunan proposal restrukturisasi OPD ke LMS UNISAN; menyediakan contoh dokumen restrukturisasi OPD nyata (anonim) dari pemerintah daerah di Sulawesi sebagai referensi; membuka sesi konsultasi daring terjadwal (synchronous via video call) untuk revisi draft kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh rubrik dan panduan dari LMS, menyelesaikan draft proposal kelompok, mengunggah draft untuk peer-review antar kelompok melalui forum LMS, dan menerima	Bahan Kajian: • Restrukturisasi OPD: prinsip, mekanisme, dan kriteria kelembagaan; • Integrasi manajemen SDM aparatur dalam perancangan OPD (rekrutmen, penempatan, pengembangan); • Evaluasi dampak restrukturisasi terhadap akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik daerah; • Simulasi sidang kelembagaan: penyusunan dan pembelaan proposal restrukturisasi OPD berbasis kasus Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Weber (1978); Riggs (1964); Thoha (2014); Pramusinto dan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Peran aktif dalam simulasi sidang kelembagaan: dinilai berdasarkan kemampuan menyampaikan pendapat secara tepat, menghargai pendapat kelompok lain, dan menunjukkan etos kerja yang berintegritas saat merespons sanggahan (nilai Integrity dan Harmony ICHSA-N); pengamatan oleh dosen menggunakan lembar observasi Tugas: Proposal restrukturisasi OPD kelompok: dokumen Word 6-	juga memberikan penilaian sejawat (peer assessment) berbasis rubrik yang disediakan MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan simulasi sidang kelembagaan: mahasiswa mensimulasikan rapat koordinasi OPD di mana tiap kelompok mempertahankan usulan restrukturisasi di hadapan 'pemangku kepentingan', mengaitkan keputusan restrukturisasi dengan prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun proposal restrukturisasi OPD untuk skenario kabupaten di Kawasan Timur Indonesia yang	umpan balik sebelum presentasi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengembangkan proposal restrukturisasi OPD berbasis skenario kabupaten di Kawasan Timur Indonesia yang diberikan, memanfaatkan hasil analisis jabatan dari minggu sebelumnya sebagai titik awal perancangan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Purwanto (2009); Dwiyanto (2011).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10 halaman memuat analisis situasi, peta jabatan usulan, proyeksi kebutuhan pegawai, dan justifikasi akuntabilitas; serta slide presentasi PowerPoint 10-15 slide	menghadapi tumpang tindih kewenangan dan defisit pegawai teknis. Proposal mencakup: (1) analisis situasi kelembagaan saat ini berdasarkan data beban kerja; (2) peta jabatan OPD yang diusulkan (bagan hierarki); (3) proyeksi kebutuhan pegawai pasca-restrukturisasi; (4) argumentasi kesesuaian dengan regulasi; dan (5) proyeksi dampak terhadap kualitas pelayanan publik. Nilai Integrity ICHSA-N diwujudkan melalui pencantuman mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam penempatan jabatan yang diusulkan. Proposal dipresentasikan dalam simulasi sidang kelembagaan di kelas. Deliverable: Dokumen proposal Word 6-10 halaman dan slide presentasi PowerPoint 10-			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				15 slide, keduanya diunggah ke LMS UNISAN paling lambat 24 jam setelah sesi luring; lembar peer assessment terisi dikumpulkan saat sesi			
11,12	Sub-CPMK6: Mengaplikasikan mekanisme penganggaran dan keuangan daerah — mencakup siklus APBD, prinsip anggaran berbasis kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data — dalam simulasi perencanaan anggaran daerah yang berintegritas dan transparan.	Mahasiswa mampu: • Menjelaskan tahapan siklus APBD — perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban — beserta aktor kelembagaan yang terlibat di tiap tahap • Membedakan anggaran berbasis input dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan kriteria efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas • Mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal pada minggu ini; kuis formatif di LMS UNISAN (5 butir uraian singkat) menguji kemampuan mahasiswa menelusuri tahapan siklus APBD dan membedakan komponen pendapatan dan belanja daerah; kriteria: ketepatan urutan tahap, ketepatan identifikasi aktor,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan mini-lecture (15 menit) untuk memperjelas konsep anggaran berbasis kinerja dan sumber pendapatan daerah; memfasilitasi latihan pemetaan siklus APBD secara kelompok di papan tulis; memimpin diskusi pleno tentang titik kerawanan akuntabilitas dalam APBD daerah di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan hasil pemetaan siklus APBD kelompok, mendiskusikan perbedaan temuan antar	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan tentang siklus APBD dan prinsip anggaran berbasis kinerja ke LMS UNISAN; menyediakan infografis interaktif alur APBD dan video dokumentasi singkat sidang DPRD pembahasan RAPBD salah satu kabupaten di Sulawesi; membuka forum diskusi asinkron dengan pertanyaan pemandu tentang perbedaan anggaran berbasis input dan kinerja (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Siklus APBD: tahapan, aktor, dan dokumen kunci dari perencanaan hingga pertanggungjawaban; • Prinsip anggaran berbasis kinerja: efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas; • Sumber pendapatan daerah: PAD, dana perimbangan, dan kemandirian fiskal; • Titik kerawanan akuntabilitas dalam siklus APBD daerah di Kawasan Timur Indonesia;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(PAD, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain) dan implikasinya terhadap kemandirian fiskal • Menganalisis potensi penyimpangan dan titik kerawanan akuntabilitas dalam siklus APBD daerah di Kawasan Timur Indonesia • Menerapkan prinsip transparansi dan integritas dalam tahap perencanaan anggaran berbasis data birokrasi	dan kejelasan perbedaan anggaran berbasis input versus kinerja Partisipasi kelas & laboratorium: Keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok saat memetakan siklus APBD secara visual di papan tulis/whiteboard: dinilai berdasarkan akurasi pemetaan, inisiatif bertanya, dan sikap transparan saat mengakui ketidakpahaman (nilai Integrity ICHSA-N) Tugas: Peta siklus APBD kabupaten/kota: diagram alur yang	kelompok, dan menerima umpan balik dosen; kemudian merevisi peta siklus APBD individual berdasarkan hasil diskusi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: analisis bersama dokumen APBD sederhana kabupaten di Sulawesi; kelompok mendiagnosis kesesuaian struktur APBD dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan mengidentifikasi potensi pemborosan atau ketidaktransparanan Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun peta siklus APBD untuk skenario kabupaten di Kawasan Timur Indonesia yang diberikan dosen. Peta memuat: (1) diagram alur	Mahasiswa membaca bahan unggahan, menyimak video dokumentasi, menjawab pertanyaan pemandu di forum LMS, dan mengerjakan kuis formatif; mulai membuat draft diagram siklus APBD sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa mengkaji dokumen APBD publik (disederhanakan) dari satu kabupaten di Kawasan Timur Indonesia yang disediakan dosen, mengidentifikasi komponen pendapatan dan belanja, serta menandai titik-titik yang berpotensi mengurangi transparansi	• Transparansi dan integritas dalam perencanaan anggaran berbasis data birokrasi; Pustaka: Dwiyanto (2011); Osborne dan Gaebler (1992); Pramusinto dan Purwanto (2009); Turnbull (2017).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memuat tahapan, aktor, dokumen kunci, dan titik kerawanan akuntabilitas; format Word atau PowerPoint, maksimal 3 halaman atau 5 slide, individual	tahapan siklus APBD (perencanaan hingga pertanggungjawaban) dengan aktor di tiap tahap; (2) identifikasi minimal tiga dokumen kunci per tahap; (3) tabel perbandingan anggaran berbasis input versus berbasis kinerja menggunakan contoh program fiktif; dan (4) catatan analisis tentang dua titik kerawanan akuntabilitas yang paling kritis dalam siklus tersebut. Nilai Integrity ICHSA-N diwujudkan melalui rekomendasi singkat mekanisme transparansi publik pada tahap perencanaan. Deliverable: Satu dokumen Word atau PowerPoint berisi peta siklus APBD lengkap (maksimal 3 halaman atau 5 slide), diunggah ke LMS UNISAN sebelum sesi luring minggu berikutnya	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; penilaian sumatif berbasis tugas kelompok dan presentasi simulasi (bobot 14%); kriteria meliputi (a) kelengkapan komponen rencana anggaran (pendapatan, belanja, dan target kinerja), (b) konsistensi antara prioritas anggaran dan data kebutuhan yang disajikan, (c) kejelasan argumentasi saat pembelaan rencana, dan (d) kemampuan mengidentifikasi risiko dan merumuskan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi simulasi sidang anggaran: tiap kelompok mempresentasikan rencana anggaran (12 menit presentasi + 10 menit tanya-jawab); dosen dan kelompok lain berperan sebagai 'Badan Anggaran DPRD' yang mengajukan pertanyaan kritis tentang prioritas dan akuntabilitas anggaran; dosen merangkum temuan lintas kelompok dan menghubungkannya dengan praktik penganggaran nyata di Kawasan Timur Indonesia (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyajikan rencana anggaran, merespons pertanyaan 'Badan Anggaran', mencatat umpan balik, dan melakukan revisi akhir	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan simulasi perencanaan APBD, template tabel anggaran, dan dataset sederhana (data penduduk, indeks pelayanan, dan kebutuhan infrastruktur) skenario kabupaten di Kawasan Timur Indonesia ke LMS UNISAN; menyediakan rubrik penilaian presentasi; membuka sesi konsultasi daring terjadwal untuk umpan balik draft kelompok (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh dataset dan template dari LMS, menyusun draft rencana anggaran kelompok berbasis data yang disediakan, mengunggah draft untuk peer-review antar	Bahan Kajian: • Simulasi perencanaan APBD: dari analisis data kebutuhan hingga alokasi anggaran program; • Pengambilan keputusan berbasis data (evidence-based budgeting) dalam penentuan prioritas belanja daerah; • Matriks target kinerja: indikator output dan outcome dalam anggaran berbasis kinerja; • Analisis risiko penyimpangan anggaran dan mekanisme transparansi serta pengawasan publik; • Praktik penganggaran daerah di Kawasan Timur Indonesia: tantangan kemandirian fiskal dan akuntabilitas;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mitigasi Partisipasi kelas & laboratorium: Peran aktif dalam simulasi sidang anggaran: dinilai berdasarkan kemampuan berargumentasi secara etis dan berbasis data, menghargai prioritas pihak lain, dan menunjukkan transparansi dalam asumsi anggaran (nilai Integrity dan Service ICHSA-N); pengamatan dosen menggunakan lembar observasi Tugas: Dokumen rencana anggaran simulasi kelompok:	dokumen setelah sesi; mahasiswa juga memberikan penilaian sejawat berbasis rubrik MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan simulasi sidang anggaran: mahasiswa mensimulasikan proses pembahasan RAPBD di mana tiap kelompok mempertahankan prioritas belanja di hadapan 'legislatif', mengintegrasikan pengambilan keputusan berbasis data dan prinsip transparansi anggaran Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun dokumen rencana anggaran simulasi untuk skenario kabupaten di Kawasan Timur Indonesia	kelompok melalui forum LMS, dan merevisi berdasarkan umpan balik sebelum presentasi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok membangun rencana anggaran simulasi secara bertahap — dari analisis data kebutuhan, penentuan prioritas program, alokasi pagu, hingga penetapan target kinerja — memanfaatkan peta siklus APBD yang disusun pada minggu sebelumnya sebagai kerangka kerja Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Pustaka: Dwiyanto (2011); Osborne dan Gaebler (1992); Turnbull (2017); Pramusinto dan Purwanto (2009); Yusriadi (2018).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			laporan Word 7-10 halaman memuat ringkasan data kebutuhan, tabel alokasi anggaran program per sektor, target kinerja terukur, dan analisis risiko; serta slide PowerPoint 12-15 slide untuk presentasi	yang diberikan dosen. Dokumen mencakup: (1) ringkasan analisis data kebutuhan (demografis, layanan dasar, dan infrastruktur) sebagai dasar penetapan prioritas; (2) tabel alokasi anggaran per sektor/program beserta pagu indikatif; (3) matriks target kinerja terukur (indikator output dan outcome) untuk tiap program; (4) analisis risiko penyimpangan dan langkah mitigasi berbasis prinsip transparansi; dan (5) narasi justifikasi pilihan prioritas anggaran. Nilai Service dan Integrity ICHSA-N diwujudkan melalui orientasi anggaran pada kebutuhan masyarakat marginal dan pencantuman mekanisme pengawasan publik. Rencana anggaran dipresentasikan dalam simulasi sidang anggaran di kelas.			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Dokumen laporan Word 7-10 halaman dan slide presentasi PowerPoint 12-15 slide, keduanya diunggah ke LMS UNISAN paling lambat 24 jam setelah sesi luring; lembar peer assessment terisi dikumpulkan saat sesi			
13,14	Sub-CPMK7: Merancang konsep inovasi pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship yang menjawab permasalahan birokrasi nyata di daerah — dilengkapi identifikasi masalah berbasis data, peta pemangku kepentingan, dan analisis kelayakan awal — secara kreatif dan kolaboratif.	Mahasiswa mampu: • Mengidentifikasi minimal tiga permasalahan birokrasi pelayanan publik nyata di daerah Kawasan Timur Indonesia dengan dukungan data kuantitatif atau kualitatif yang sah • Memetakan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) yang relevan terhadap masalah yang dipilih, mencakup peran, kepentingan, dan tingkat pengaruh	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas konsep yang dipresentasikan secara singkat (elevator pitch 5 menit per kelompok) dengan kriteria: ketajaman identifikasi masalah berbasis	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi design studio di kelas: setiap kelompok memaparkan elevator pitch konsep inovasi (5 menit) menggunakan LCD proyektor, dilanjutkan diskusi peer review terstruktur (10 menit per kelompok); dosen memberikan umpan balik substantif yang mengarahkan penyempurnaan analisis kelayakan dan ketajaman data masalah (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video penjelasan singkat (15-20 menit) tentang kerangka desain inovasi pelayanan publik berbasis e-government dan contoh kasus nyata dari daerah Kawasan Timur Indonesia ke LMS UNISAN; menyediakan template stakeholder map dan concept brief yang dapat diunduh; membuka forum diskusi asinkron untuk konsultasi kelompok (via LMS; sinkron/asinkron).	Bahan Kajian: • Kerangka desain inovasi pelayanan publik berbasis e-government: prinsip dan tahapan; • Identifikasi masalah birokrasi berbasis data: teknik pemetaan masalah dan penggunaan data sekunder resmi; • Stakeholder mapping dalam konteks reformasi birokrasi daerah; • Analisis kelayakan awal inovasi: dimensi teknis, sosial, dan	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		masing-masing pihak • Merancang konsep awal inovasi pelayanan publik berbasis e-government atau technopreneurship daerah yang secara logis menjawab akar masalah yang teridentifikasi • Menyusun analisis kelayakan awal (teknis, sosial, dan regulasi) atas konsep inovasi yang dirancang berdasarkan konteks kelembagaan dan infrastruktur daerah • Berkolaborasi secara kreatif dalam kelompok untuk mengintegrasikan perspektif lintas sektor dalam desain konsep inovasi	data, kelengkapan stakeholder map, dan relevansi solusi e-government terhadap konteks lokal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok lain dalam sesi peer review; menunjukkan sikap kolaboratif dan menghargai perbedaan perspektif antar-anggota sesuai nilai Harmony dan Creativity ICHSA-N Tugas: Dokumen Konsep Inovasi Awal	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan draft concept brief; kelompok lain mengisi lembar peer review terstruktur (kriteria: kejelasan masalah, kelengkapan stakeholder map, kesesuaian solusi, dan kelayakan awal); papan tulis digunakan untuk memetakan secara visual hubungan antar-pemangku kepentingan dari tiap kelompok MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi peer review: mahasiswa mendapat umpan balik langsung dari sesama mahasiswa dan dosen untuk memperkuat konsep inovasi sebelum dikembangkan menjadi proposal lengkap	Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses video dan membaca bahan bacaan yang ditautkan di LMS; mengerjakan pengisian draft stakeholder map dan identifikasi masalah secara berkelompok melalui kolaborasi daring (Google Docs atau platform sejenis); mengunggah draft awal ke forum diskusi untuk mendapat umpan balik dosen sebelum pertemuan luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa secara berkelompok menginisiasi proyek inovasi nyata dengan mengerjakan fase identifikasi masalah dan pemetaan pemangku kepentingan sebagai	regulasi; • Prinsip entrepreneurial government sebagai landasan inovasi sektor publik daerah; Pustaka: Osborne dan Gaebler (1992); Zia dan Omezzine (2017); Dwiyanto (2011); Yusriadi (2018).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(concept brief) maksimal 5 halaman A4 (tidak termasuk lampiran stakeholder map) yang memuat: rumusan masalah berbasis data, stakeholder map beraplikasi diagram, konsep solusi e-government/technopreneurship, dan analisis kelayakan awal tiga dimensi (teknis, sosial, regulasi); dikumpulkan melalui LMS UNISAN sebelum pertemuan berikutnya	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun Dokumen Konsep Inovasi Awal yang mengangkat satu permasalahan pelayanan publik nyata di daerah, diprioritaskan dari Kawasan Timur Indonesia. Dokumen memuat: (1) rumusan masalah disertai minimal dua data pendukung (statistik, laporan resmi, atau hasil observasi lapangan); (2) stakeholder map dalam format diagram yang memetakan aktor, peran, dan tingkat kepentingan/pengaruh; (3) konsep solusi berbasis e-government atau technopreneurship daerah yang merujuk pada prinsip reinventing government; (4) analisis kelayakan awal mencakup dimensi teknis (infrastruktur dan SDM), sosial (penerimaan	fondasi proposal akhir Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				masyarakat), dan regulasi (kesesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku). Nilai Creativity dan Service ICHSA-N diwujudkan melalui orisinalitas solusi yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat daerah Deliverable: Satu dokumen concept brief format PDF maksimal 5 halaman (tidak termasuk lampiran diagram stakeholder map) diunggah ke LMS UNISAN; satu sesi presentasi elevator pitch 5 menit disertai satu slide ringkasan yang ditampilkan di kelas			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian berbasis produk proposal tertulis dengan bobot 14% dari nilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi klinik proposal di kelas: setiap kelompok mendapat giliran konsultasi 10 menit dengan dosen untuk mendiskusikan kerangka rencana implementasi dan indikator keberhasilan;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penulisan proposal lengkap dan rubrik penilaian terperinci ke LMS UNISAN; menyediakan sesi konsultasi daring terjadwal (office hours)	Bahan Kajian: • Penulisan proposal inovasi pelayanan publik: sistematika dan standar akademik; • Rencana implementasi bertahap inovasi e-government di	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			akhir MK; kriteria penilaian proposal mencakup: (1) ketajaman identifikasi masalah dan relevansi data (20%), (2) kelengkapan dan keterukuran rencana implementasi bertahap (25%), (3) kualitas indikator keberhasilan SMART (20%), (4) kesesuaian strategi adaptasi dengan konteks lokal Kawasan Timur Indonesia (20%), (5) koherensi argumentasi teoritis dan kerapian sistematika penulisan (15%)	dosen menggunakan papan tulis untuk mengilustrasikan struktur logis proposal yang baik dan menunjukkan contoh indikator SMART yang relevan dengan pelayanan publik daerah (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa draft proposal yang telah dikerjakan; mengikuti sesi klinik kelompok dan mencatat umpan balik dosen; sesi terakhir 30 menit digunakan untuk finalisasi proposal secara mandiri di kelas sebelum pengumpulan; kelompok yang sudah selesai dapat saling memberikan umpan balik menggunakan rubrik yang sama MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan klinik proposal:	melalui video call untuk kelompok yang membutuhkan asistensi pengembangan proposal; mengunggah contoh proposal inovasi e-government daerah yang telah disunting sebagai referensi mutu penulisan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh rubrik penilaian dan panduan penulisan; mengerjakan pengembangan proposal secara kolaboratif daring dengan mengintegrasikan umpan balik peer review minggu ke-13; melakukan penelusuran mandiri portal e-government dan dokumen kebijakan resmi yang relevan dengan kasus yang dipilih sebagai data pendukung tambahan	lingkungan pemerintah daerah; • Indikator keberhasilan SMART dalam konteks reformasi birokrasi; • Strategi adaptasi inovasi terhadap konteks lokal: keterbatasan infrastruktur dan SDM aparatur Kawasan Timur Indonesia; • Analisis risiko implementasi program inovasi sektor publik; Pustaka: Zia dan Omezzine (2017); Dwiyanto (2011); Osborne dan Gaebler (1992); Yusriadi (2018); Pramusinto dan Purwanto (2009).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi konsultasi dosen dan diskusi antar-kelompok; menunjukkan sikap Integrity dalam originalitas konten proposal dan Adaptability dalam merespons umpan balik secara konstruktif; tidak plagiat dan mencantumkan sumber secara benar Tugas: Proposal inovasi pelayanan publik lengkap format Microsoft Word yang dikonversi PDF, panjang 12-15 halaman A4 (tidak termasuk daftar pustaka dan	pendekatan asistensi individual per kelompok yang mendorong mahasiswa mengambil keputusan desain secara mandiri berdasarkan argumen teoritis yang kuat Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mengembangkan concept brief minggu ke-13 menjadi proposal inovasi pelayanan publik yang komprehensif. Proposal harus menunjukkan elaborasi signifikan dari konsep awal, khususnya pada: (1) rencana implementasi bertahap yang memuat minimal tiga fase dengan target waktu, penanggung jawab, dan sumber daya yang diperlukan; (2) minimal lima indikator keberhasilan yang memenuhi kriteria SMART dan dapat dievaluasi secara berkala	MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa melanjutkan pengerjaan proyek inovasi pada fase pengembangan proposal komprehensif, dengan asistensi dosen sebagai fasilitator bukan instruktur Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lampiran), dikumpulkan melalui LMS UNISAN pada akhir pertemuan minggu ke-14; sistematika: judul, latar belakang dan rumusan masalah berbasis data, tinjauan teori dan regulasi, deskripsi inovasi e-government/technopreneurship, rencana implementasi bertahap, indikator keberhasilan SMART, strategi adaptasi konteks lokal, analisis risiko, dan daftar pustaka	oleh pemerintah daerah; (3) strategi adaptasi yang secara eksplisit mempertimbangkan keterbatasan konektivitas internet, kapasitas SDM aparatur, dan karakteristik demografis wilayah Kawasan Timur Indonesia; (4) analisis risiko implementasi beserta mitigasinya. Nilai Creativity tercermin dalam orisinalitas desain inovasi; nilai Service dalam orientasi proposal pada peningkatan nyata kesejahteraan masyarakat; nilai Nationalism dalam komitmen memperkuat kapasitas birokrasi daerah yang berkeadilan Deliverable: Satu dokumen proposal inovasi pelayanan publik format PDF panjang 12-15 halaman (tidak termasuk lampiran dan daftar pustaka), diunggah ke LMS UNISAN dengan batas waktu yang ditetapkan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dosen; dilengkapi satu lampiran diagram rencana implementasi bertahap (timeline/Gantt chart sederhana) dalam format tabel atau diagram			
15	Sub-CPMK8: Mengembangkan dan mempresentasikan proposal inovasi pelayanan publik yang komprehensif — mencakup rencana implementasi bertahap, indikator keberhasilan terukur, dan strategi adaptasi terhadap konteks lokal Kawasan Timur Indonesia — secara adaptif demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Mahasiswa mampu: • Mempresentasikan proposal inovasi pelayanan publik secara komprehensif dan sistematis di hadapan panel penilai dengan menggunakan media visual yang efektif • Mengartikulasikan rencana implementasi bertahap dan indikator keberhasilan secara meyakinkan dengan argumentasi berbasis data dan teori yang relevan • Mempertahankan relevansi strategi adaptasi inovasi terhadap konteks lokal	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis; penilaian berbasis presentasi dan tanya jawab dengan bobot 7% dari nilai akhir MK; kriteria penilaian presentasi mencakup: (1) kejelasan dan sistematika penyampaian rencana implementasi bertahap (25%), (2) keterukuran dan kelayakan indikator keberhasilan yang	BP — Mekanisme kuliah: Dosen bertindak sebagai moderator dan anggota panel penilai utama; memimpin sesi presentasi formal di kelas dengan alokasi waktu 15 menit presentasi dan 10 menit tanya jawab per kelompok; menggunakan LCD proyektor dan speaker aktif untuk mendukung kualitas penyajian; memberikan umpan balik tertulis singkat per kelompok setelah semua presentasi selesai; menutup pertemuan dengan sintesis dosen tentang pola inovasi terbaik dan catatan perbaikan untuk pengembangan ke depan (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah jadwal giliran presentasi, rubrik penilaian final, dan panduan tata cara presentasi formal ke LMS UNISAN; menyediakan forum Q&A asinkron untuk mahasiswa yang ingin mengkonsultasikan slide sebelum hari presentasi; mendistribusikan lembar peer assessment digital yang diisi mahasiswa saat menilai kelompok lain (via LMS; sinkron/asinkron). MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning pada fase presentasi dan	Bahan Kajian: • Presentasi akademik proposal inovasi: teknik penyampaian dan pengelolaan tanya jawab; • Evaluasi komprehensif proposal inovasi pelayanan publik: kriteria kelayakan implementasi dan dampak sosial; • Strategi adaptasi inovasi e-government terhadap konteks lokal Kawasan Timur Indonesia: infrastruktur, budaya birokrasi, dan kapasitas aparatur; • Indikator keberhasilan reformasi birokrasi berbasis kinerja: sintesis	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kawasan Timur Indonesia melalui jawaban yang tepat atas pertanyaan kritis panel • Mengevaluasi kekuatan dan kelemahan proposal kelompok lain menggunakan kriteria reformasi birokrasi dan kelayakan implementasi e-government secara kritis namun konstruktif • Menampilkan sikap adaptif dan percaya diri dalam menyesuaikan argumentasi berdasarkan umpan balik panel demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat daerah	dipresentasikan (20%), (3) kekuatan argumentasi adaptasi konteks lokal Kawasan Timur Indonesia (25%), (4) kualitas respons terhadap pertanyaan kritis panel (20%), (5) efektivitas media presentasi dan pengelolaan waktu (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan sebagai penanya atau pemberi umpan balik konstruktif saat kelompok lain presentasi; menunjukkan nilai Service melalui orientasi proposal pada peningkatan nyata layanan publik;	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan proposal inovasi sesuai urutan jadwal; mahasiswa dari kelompok lain mengisi lembar peer assessment tertulis selama presentasi berlangsung; panel tanya jawab bersifat kritis dan konstruktif untuk menguji kedalaman pemahaman dan kesiapan implementasi; papan tulis digunakan untuk merangkum poin kunci dari tiap presentasi secara kolektif MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan sesi presentasi panel: mahasiswa mempublikasikan hasil proyek inovasi dalam forum akademik formal, merespons umpan balik kritis, dan merefleksikan pembelajaran sepanjang	evaluasi akhir: mahasiswa mendemonstrasikan hasil proyek inovasi kepada publik akademik dan menerima evaluasi komprehensif sebagai bagian dari siklus pembelajaran berbasis proyek Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	akhir semester; • Refleksi kritis atas perjalanan reformasi birokrasi dan e-government di Indonesia; Pustaka: Zia dan Omezzine (2017); Dwiyanto (2011); Osborne dan Gaebler (1992); Pramusinto dan Purwanto (2009); Yusriadi (2018).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			menunjukkan Integrity dalam menyajikan data secara jujur dan akurat; hadir tepat waktu dan berpakaian rapi sesuai konteks presentasi formal akademik Tugas: Satu set slide presentasi final format PowerPoint (15-20 slide) yang merangkum proposal inovasi secara visual dan informatif, diunggah ke LMS UNISAN sebelum jadwal presentasi; satu lembar ringkasan eksekutif (executive summary) maksimal 1 halaman A4 yang	semester sebagai wujud capaian Sub-CPMK8 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Setiap kelompok mempresentasikan proposal inovasi pelayanan publik final di hadapan panel penilai (dosen dan sesama mahasiswa). Presentasi harus menampilkan secara komprehensif: (1) latar belakang masalah berbasis data yang ringkas dan meyakinkan; (2) deskripsi inovasi e-government atau technopreneurship daerah yang dirancang; (3) rencana implementasi bertahap dengan visual timeline yang jelas; (4) minimal lima indikator keberhasilan SMART; (5) strategi adaptasi terhadap karakteristik lokal Kawasan Timur Indonesia, termasuk keterbatasan infrastruktur, heterogenitas			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			dibagikan kepada panel penilai pada saat presentasi	budaya, dan kapasitas aparatur. Setiap anggota kelompok wajib berbicara minimal satu bagian. Nilai Adaptability ICHSA-N diwujudkan melalui kemampuan merespons pertanyaan kritis dengan fleksibel; nilai Nationalism melalui komitmen proposal pada pengutan tata kelola daerah yang berkeadilan dan berdaulat. Sebagai penutup, setiap mahasiswa mengisi lembar refleksi individual singkat tentang pembelajaran terpenting yang diperoleh sepanjang semester terkait reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik Deliverable: Satu set slide presentasi final format PowerPoint (15-20 slide) diunggah ke LMS UNISAN sebelum hari presentasi; satu lembar ringkasan eksekutif proposal maksimal 1 halaman A4 dicetak dan diserahkan kepada panel			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				saat presentasi; satu lembar refleksi individual (tidak lebih dari setengah halaman A4) diunggah ke LMS UNISAN pada hari yang sama setelah presentasi selesai			
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester : Cakupan: Sub-CPMK5–Sub-CPMK8						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. **PB**= Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT**=Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM**=Kegiatan Mandiri, **P**=Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Kuis Konsep	10	
2	Tugas Analisis Kasus	10	
3	Ujian Tengah Semester	20	
4	Proyek Inovasi Pelayanan	40	
5	Ujian Akhir Semester	20	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Kuis Konsep	Tugas Analisis Kasus	Ujian Tengah Semester	Proyek Inovasi Pelayanan	Ujian Akhir Semester	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	5	—	5	—	—	10
Sub-CPMK2	5	—	5	—	—	10
Sub-CPMK3	—	3	5	—	—	8
Sub-CPMK4	—	3	5	—	—	8
Sub-CPMK5	—	2	—	—	5	7
Sub-CPMK6	—	2	—	—	5	7
Sub-CPMK7	—	—	—	20	5	25
Sub-CPMK8	—	—	—	20	5	25
Bobot Komponen (%)	10	10	20	40	20	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas: Final Project: Merancang dan Mempresentasikan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government untuk Pemerintah Daerah/Desa di Sulawesi

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				
RENCANA TUGAS MAHASISWA					
MATA KULIAH	Birokrasi Pemerintahan				
KODE	3KKBP408	sks	3	SEMESTER	4
DOSEN PENGAMPU	Purwanto, S.IP., M.Si.				
METODE PENUGASAN					
Project-Based Learning (PjBL) berbasis studi kasus kontekstual Kawasan Timur Indonesia					
JUDUL TUGAS					
Final Project: Merancang dan Mempresentasikan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government untuk Pemerintah Daerah/Desa di Sulawesi					
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH					
Sub-CPMK3: Menganalisis pola hubungan pusat–daerah dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta mengidentifikasi isu koordinasi antarjenjang pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus daerah otonom di Sulawesi.					
Sub-CPMK4: Mengevaluasi dinamika otonomi khusus dan otonomi daerah desa di Kawasan Timur Indonesia — termasuk implementasi Dana Desa, BUMDes, dan musyawarah desa — dengan membandingkan minimal dua daerah/desa di wilayah Sulawesi dan sekitarnya.					

Sub-CPMK5: Menerapkan prinsip manajemen SDM aparatur dan tata kelola organisasi perangkat daerah — meliputi analisis jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, dan restrukturisasi OPD — secara akuntabel melalui simulasi kasus pemerintah daerah.

Sub-CPMK6: Mengaplikasikan mekanisme penganggaran dan keuangan daerah — mencakup siklus APBD, prinsip anggaran berbasis kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data — dalam simulasi perencanaan anggaran daerah yang berintegritas dan transparan.

Sub-CPMK7: Merancang konsep inovasi pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship yang menjawab permasalahan birokrasi nyata di daerah — dilengkapi identifikasi masalah berbasis data, peta pemangku kepentingan, dan analisis kelayakan awal — secara kreatif dan kolaboratif.

Sub-CPMK8: Mengembangkan dan mempresentasikan proposal inovasi pelayanan publik yang komprehensif — mencakup rencana implementasi bertahap, indikator keberhasilan terukur, dan strategi adaptasi terhadap konteks lokal Kawasan Timur Indonesia — secara adaptif demi peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa secara berkelompok mengidentifikasi permasalahan birokrasi nyata pada satu pemerintah daerah atau desa di wilayah Sulawesi (atau Kawasan Timur Indonesia yang berbatasan), kemudian menganalisis akar masalah menggunakan kerangka desentralisasi dan manajemen OPD, merancang konsep inovasi pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship, dan menyusun proposal inovasi komprehensif yang mencakup rencana implementasi bertahap, indikator keberhasilan terukur, serta strategi adaptasi terhadap konteks lokal—yang seluruhnya dipresentasikan secara terbuka di hadapan dosen dan pembahas sejawat. Proyek ini mengintegrasikan seluruh capaian Sub-CPMK mata kuliah Birokrasi Pemerintahan dari analisis regulasi, pola hubungan pusat–daerah, tata kelola SDM aparatur dan keuangan daerah, hingga perancangan inovasi yang berintegritas, kreatif, dan adaptif.

CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)

Identifikasi dan pemetaan masalah birokrasi nyata di satu daerah/desa di Sulawesi berbasis data sekunder (dokumen LPPD, laporan BPS, laporan BPK, atau berita resmi) dan, bila memungkinkan, wawancara/observasi lapangan minimal dua narasumber aparatur atau tokoh masyarakat.

Analisis regulasi dan kelembagaan: memetakan landasan hukum (UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014, dan regulasi turunannya) serta mengidentifikasi letak masalah dalam hierarki kelembagaan dan pembagian urusan pemerintahan konkuren.

Analisis pola hubungan pusat–daerah: menelaah dimensi desentralisasi, dekonsentrasi, atau tugas pembantuan yang relevan dengan masalah yang dipilih, termasuk isu koordinasi antarjenjang yang khas di Kawasan Timur Indonesia.

Analisis dinamika otonomi dan keuangan daerah: mengkaji implementasi Dana Desa/BUMDes atau siklus APBD yang berkaitan dengan masalah, dengan membandingkan dua daerah/desa sebagai pembandingan.

Peta pemangku kepentingan (stakeholder map) yang mengidentifikasi aktor, kepentingan, dan tingkat pengaruh masing-masing dalam konteks inovasi yang dirancang.

Konsep inovasi pelayanan publik berbasis e-government/technopreneurship: mencakup deskripsi solusi, teknologi/mechanisme yang digunakan, dan relevansinya terhadap kebutuhan lokal Kawasan Timur Indonesia.

Rencana implementasi bertahap (minimal tiga fase: persiapan, piloting, dan skalabilitas) dengan tonggak capaian (milestones) dan indikator keberhasilan terukur (minimal lima indikator SMART).

Analisis kelayakan awal: teknis, regulatif, finansial (estimasi biaya dan sumber pendanaan), dan sosial-budaya—termasuk strategi adaptasi terhadap heterogenitas konteks lokal.

Integrasi nilai ICHSA-N: Integrity ditunjukkan melalui transparansi data dan sumber; Creativity dalam desain solusi; Harmony dalam pendekatan partisipatif pemangku kepentingan; Service dalam orientasi dampak masyarakat; Adaptability dalam strategi konteks lokal; Nationalism dalam penguatan kapasitas pemerintahan daerah sebagai wujud desentralisasi yang bermartabat.

LANGKAH Pengerjaan Tugas

Langkah 1 (Mg 3–4) — Pembentukan Kelompok & Pemilihan Kasus: Kelompok 4–5 mahasiswa dibentuk secara heterogen. Setiap kelompok memilih satu daerah/desa di Sulawesi sebagai lokus, mengajukan 'Lembar Proposal Topik' (½ hal) berisi justifikasi relevansi masalah dan ketersediaan data, lalu mendapat persetujuan dosen sebelum melanjutkan.

Langkah 2 (Mg 5–6) — Identifikasi Masalah & Kajian Regulasi: Kelompok mengumpulkan data sekunder (dokumen LPPD, laporan BPK/BPKP, data BPS, regulasi terkait) dan bila memungkinkan melakukan wawancara minimal dua narasumber. Output antara: 'Lembar Identifikasi Masalah' (1–2 hal) yang memetakan masalah birokrasi secara spesifik dan landasan hukum yang mengatur.

Langkah 3 (Mg 7–8) — Analisis Desentralisasi, Hubungan Pusat–Daerah, & Perbandingan Daerah: Kelompok menganalisis dimensi desentralisasi/dekonsentrasi/tugas pembantuan dan isu koordinasi antarjenjang, serta membandingkan minimal dua daerah/desa. Output antara: 'Matriks Analisis Desentralisasi & Perbandingan Daerah' yang diserahkan sebelum UTS.

Langkah 4 (Mg 9–10) — Analisis SDM Aparatur, OPD, & Keuangan Daerah: Kelompok menelaah aspek manajemen SDM (analisis jabatan, kebutuhan pegawai, struktur OPD) dan keuangan daerah (siklus APBD, anggaran berbasis kinerja) yang berkaitan dengan masalah. Output antara: 'Lembar Analisis Internal OPD & Keuangan' (2–3 hal).

Langkah 5 (Mg 11–12) — Perancangan Konsep Inovasi & Peta Pemangku Kepentingan: Kelompok merancang solusi inovasi e-government/technopreneurship, menyusun peta pemangku kepentingan, dan melakukan analisis kelayakan awal. Output antara: 'Kanvas Inovasi' (format satu halaman terstruktur: masalah, solusi, teknologi, pemangku kepentingan, kelayakan).

Langkah 6 (Mg 13–14) — Penyusunan Proposal Inovasi Komprehensif: Kelompok mengintegrasikan seluruh analisis ke dalam dokumen proposal lengkap mencakup: latar belakang & identifikasi masalah, kajian regulasi & kelembagaan, analisis desentralisasi & perbandingan daerah, konsep inovasi, peta pemangku kepentingan, rencana implementasi bertahap (3 fase), indikator keberhasilan SMART (min. 5), analisis kelayakan, dan strategi adaptasi lokal. Draf diserahkan ke dosen untuk umpan balik tertulis.

Langkah 7 (Mg 15) — Presentasi & Sidang Proposal: Setiap kelompok mempresentasikan proposal (15 menit paparan + 10 menit tanya jawab) di hadapan dosen penilai dan satu kelompok pembahas sejawat yang ditunjuk secara rotasi. Pembahas sejawat wajib mengajukan minimal dua pertanyaan substantif. Rekaman/dokumentasi presentasi dikumpulkan.

Langkah 8 (Mg 16/UAS) — Finalisasi & Pengumpulan: Kelompok merevisi proposal berdasarkan umpan balik sidang dan menyerahkan dokumen final beserta slide presentasi, rekaman sidang, dan lembar refleksi individu (½ hal per anggota tentang kontribusi dan pembelajaran).

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. **Dokumen Proposal Inovasi Pelayanan Publik (final, min. 20 hal, format PDF):** mencakup identifikasi masalah berbasis data, kajian regulasi & kelembagaan, analisis desentralisasi & perbandingan dua daerah/desa di Sulawesi, konsep inovasi e-government, peta pemangku kepentingan, rencana implementasi 3 fase, min. 5 indikator keberhasilan SMART, analisis kelayakan (teknis/regulatif/finansial/sosial), dan daftar pustaka. 2) **Slide Presentasi (format PDF/PPTX, min. 15 slide).** 3) **Rekaman video sidang (format MP4, durasi sesuai pelaksanaan).** 4) **Lembar refleksi individu dari setiap anggota kelompok (½–1 hal per orang, format PDF).**

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN

a. Identifikasi Masalah & Kajian Regulasi (bobot 20%). Masalah birokrasi diidentifikasi secara spesifik dan terverifikasi melalui data sekunder (dan/atau narasumber), disertai pemetaan landasan hukum (UUD 1945, UU No. 23/2014, UU No. 6/2014, regulasi turunan) yang akurat, relevan, dan menunjukkan pemahaman hierarki kelembagaan serta pembagian urusan konkuren.

b. Analisis Desentralisasi, Hubungan Pusat–Daerah, & Perbandingan Daerah (bobot 20%). Analisis secara tajam menelaah dimensi desentralisasi, dekonsentrasi, dan/atau tugas pembantuan yang relevan, mengidentifikasi isu koordinasi antarjenjang khas Kawasan Timur Indonesia, dan membandingkan minimal dua daerah/desa di Sulawesi secara kritis dengan argumentasi yang didukung data.

c. Analisis SDM Aparatur, OPD, & Keuangan Daerah (bobot 15%). Analisis menunjukkan keterkaitan yang logis antara permasalahan yang dipilih dengan aspek manajemen SDM aparatur (analisis jabatan, kebutuhan pegawai, struktur OPD) dan/atau keuangan daerah (siklus APBD, anggaran berbasis kinerja), dengan rekomendasi yang akuntabel dan berbasis data.

d. Kualitas Rancangan Inovasi & Kelayakan (bobot 25%). Konsep inovasi e-government/technopreneurship dirancang secara kreatif dan orisinal, dilengkapi peta pemangku kepentingan yang lengkap, rencana implementasi tiga fase dengan milestones yang jelas, min. 5 indikator keberhasilan SMART, serta analisis kelayakan (teknis/regulatif/finansial/sosial) dan strategi adaptasi lokal yang realistis dan kontekstual.

e. Presentasi, Kemampuan Argumentasi, & Pembahas Sejawat (bobot 15%). Paparan disampaikan secara sistematis, komunikatif, dan percaya diri; mampu merespons pertanyaan penguji dengan

argumentasi yang berbasis konsep dan data; serta—bagi kelompok pembahas—mengajukan minimal dua pertanyaan substantif yang relevan, menunjukkan kemampuan evaluasi kritis sejawat.

f. Refleksi Individu & Integrasi Nilai ICHSA-N (bobot 5%). Lembar refleksi individu menguraikan kontribusi nyata anggota dalam proyek dan menghubungkan pengalaman tersebut dengan minimal dua nilai ICHSA-N (Integrity, Creativity, Harmony, Service, Adaptability, Nationalism) secara spesifik dan reflektif—bukan pernyataan generik.

JADWAL PELAKSANAAN

Mg 3–4: Pembentukan kelompok, pemilihan lokus daerah/desa di Sulawesi, pengajuan dan persetujuan Lembar Proposal Topik.
Mg 5–6: Pengumpulan data sekunder dan/atau wawancara narasumber; penyerahan Lembar Identifikasi Masalah.
Mg 7–8: Analisis desentralisasi, hubungan pusat–daerah, dan perbandingan dua daerah/desa; penyerahan Matriks Analisis Desentralisasi & Perbandingan (output antara sebelum UTS).
Mg 9–10: Analisis manajemen SDM aparatur, OPD, dan keuangan daerah; penyerahan Lembar Analisis Internal OPD & Keuangan.
Mg 11–12: Perancangan konsep inovasi e-government, penyusunan peta pemangku kepentingan, dan analisis kelayakan awal; penyerahan Kanvas Inovasi.
Mg 13–14: Penyusunan Proposal Inovasi komprehensif; penyerahan draf ke dosen untuk umpan balik tertulis.
Mg 15: Sidang Presentasi Proposal — paparan 15 menit + tanya jawab 10 menit per kelompok; satu kelompok berperan sebagai pembahas sejawat secara rotasi.
Mg 16 (UAS): Pengumpulan dokumen Proposal Final (revisi pasca-sidang), slide, rekaman sidang, dan lembar refleksi individu melalui platform LMS paling lambat H+3 setelah jadwal UAS.

LAIN-LAIN

Final project dikerjakan secara berkelompok (4–5 mahasiswa per kelompok) dengan pembagian peran yang dideklarasikan sejak awal (tertuang dalam Lembar Proposal Topik), namun setiap anggota wajib mampu menjelaskan seluruh bagian proposal saat sidang—penilai dapat mengarahkan pertanyaan kepada anggota mana pun. Kontribusi individu dinilai melalui lembar refleksi individu dan observasi aktif selama sidang; anggota yang tidak hadir saat sidang tanpa izin tertulis memperoleh nilai nol pada komponen presentasi. Keterlambatan pengumpulan output antara (Mg 5–14) dikenai pengurangan 5 poin per hari dari skor komponen terkait; keterlambatan pengumpulan dokumen final (Mg 16) dikenai pengurangan 10 poin per hari. Plagiarisme antara sesama kelompok atau dari sumber lain (terdeteksi similarity >30% pada platform yang ditetapkan dosen) menyebabkan proposal dikembalikan untuk perbaikan dan nilai dipotong 20 poin dari total akhir sebagai wujud internalisasi nilai Integrity. Lokus daerah/desa yang dipilih harus berbeda antar-kelompok dan disetujui dosen pada Mg 3–4 untuk menghindari duplikasi; prioritas diberikan pada daerah/desa di Sulawesi yang memiliki data publik yang dapat diverifikasi, sejalan dengan semangat pelayanan terhadap penguatan kapasitas pemerintahan di Kawasan Timur Indonesia (nilai Service dan Nationalism).

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, A. A., & Purwanti, R. (2021). *Birokrasi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Hidayat, S., & Triwibowo, W. (Eds.). (2011). *Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: LIPI Press.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Kemendes.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maksum, I. R. (2020). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Mardianis. (2019). *Manajemen Sumber Daya Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Reading: Addison-Wesley.
- Pramusinto, A., & Purwanto, E. A. (Eds.). (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Santoso, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.

Siagian, S. P. (2012). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Umasugi, S. (2018). Dinamika Pemerintahan Desa di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(1), 45–62.

Yustisia, T. N. (2015). *Panduan Resmi Memahami Desa*. Jakarta: Visimedia.

5.1 Rubrik Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Keaktifan	Aktif & relevan sepanjang diskusi	Cukup aktif	Jarang	Pasif
2	Kualitas kontribusi	Ide bernas & menambah wawasan	Ide baik	Ide umum	Tidak berbobot
3	Menghargai pendapat	Menyimak & menanggapi santun	Menghargai	Kadang memotong	Mendominasi/abai
4	Tanggung jawab tugas	Selalu siap & tepat waktu	Umumnya siap	Sering terlambat	Lalai
5	Etika & sikap	Sopan, jujur, kolaboratif	Baik	Kurang	Buruk

5.2 Rubrik Proyek Analisis Kebijakan — Proyek Inovasi Pelayanan

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Proyek Inovasi Pelayanan			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi
3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.